

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA TANGERANG

TAHUN 2023



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA TANGERANG

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran 2023. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sebagai penutup, LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 yang telah disusun ini semoga dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih, masukan dan saran untuk perbaikan kedepan sangat diharapkan untuk hasil yang jauh lebih baik

Kota Tangerang, Januari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Tangerang

H. Maryono, AP.MSi
NIP 197502101993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	8
IKHTISAR EKSEKUTIF	9
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang.....	11
1.1.1 Dasar Hukum Terbentuknya Organisasi.....	11
1.1.2 Tujuan Terbentuknya Organisasi.....	11
1.1.3 Aspek Strategis Organisasi	11
1.1.4 Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi	12
1.1.5 Potensi Organisasi	12
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	13
1.2.1 Gambaran Umum Organisasi	13
1.2.2 Kedudukan	13
1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	13
1.3 Struktur Organisasi	16
1.4 Aset	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Perencanaan Kinerja Tahun 2023	20
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	20
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan IKU Perangkat Daerah.....	20

2.2 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2023	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023.....	24
3.1 Sasaran Strategis 1 (Tujuan).....	25
3.1.1 Uraian Pencapaian Tujuan	26
3.1.2 Upaya Yang Telah Dilakukan.....	30
3.1.3 Permasalahan Yang Dihadapi	31
3.1.4 Solusi Terhadap Permasalahan.....	31
3.2 Sasaran Strategis 2 (Sasaran 1)	32
3.2.1 Uraian Pencapaian Tujuan	33
3.2.2 Upaya Yang Telah Dilakukan.....	34
3.2.3 Permasalahan Yang Dihadapi	37
3.2.4 Solusi Terhadap Permasalahan.....	37
3.3 Sasaran Strategis 3 (Sasaran 2)	38
3.3.1 Uraian Pencapaian Tujuan	38
3.3.2 Upaya Yang Telah Dilakukan.....	40
3.3.3 Permasalahan Yang Dihadapi	45
3.3.4 Solusi Terhadap Permasalahan.....	45
3.4 Sasaran Strategis 4 (Sasaran 3)	46
3.4.1 Uraian Pencapaian Tujuan	47
3.4.2 Upaya Yang Telah Dilakukan.....	48
3.4.3 Permasalahan Yang Dihadapi	49
3.4.4 Solusi Terhadap Permasalahan.....	50
3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (mencakup realisasi capaian kinerja & realisasi capaian anggaran)	50
3.6 Akuntabilitas Keuangan.....	52
3.6.1 Realisasi Anggaran	52
3.6.2 Realisasi Pendapatan (Retribusi APAR)	58

BAB IV PENUTUP..... 61

4.1 Simpulan 61

4.2. Saran..... 62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kondisi Pegawai BPBD Kota Tangerang Tahun 2023	17
Tabel 2. Aset BPBD Kota Tangerang.....	18
Tabel 3. Indikator Kinerja Utama BPBD berdasarkan Renstra tahun 2019-2023	22
Tabel 4. Perjanjian Kinerja (perubahan) Tahun 2023	23
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Tangerang Tahun 2023.....	25
Tabel 7. Evaluasi Pencapaian Tujuan.....	26
Tabel 8. Pengukuran Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023	26
Tabel 9. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023	27
Tabel 11. Perbandingan IRB Nasional dan Kota Tangerang	29
Tabel 12. Perbandingan IRB Provinsi Banten dan Kota Tangerang.....	30
Tabel 13. Program Pendukung Pelaksanaan Indikator	31
Tabel 12. Evaluasi Pencapaian Sasaran 1	32
Tabel 13. Pengukuran Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023	33
Tabel 14. Analisis Pencapaian Target Akhir 2023.....	33
Tabel 15. Program Pendukung Pelaksanaan Indikator	35
Tabel 16. Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Kedaruratan Tahun 2023	36
Tabel 17. Evaluasi Pencapaian Sasaran 2	38
Tabel 18. Pengukuran Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023	38
Tabel 19. Analisis Pencapaian Target Akhir 2023.....	39
Tabel 20. Program Pendukung Pelaksanaan Indikator	41
Tabel 21. Rekap Kejadian Kebakaran Tahun 2023	41
Tabel 22. Capaian Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) di Tahun 2023.....	43
Tabel 23. Rekap Kejadian Kedaruratan Tahun 2023	45
Tabel 24. Evaluasi Pencapaian Tujuan.....	46

Tabel 25. Pengukuran Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023	47
Tabel 26. Analisis Pencapaian Target Akhir 2023.....	47
Tabel 27. Program Pendukung Pelaksanaan Indikator	49
Tabel 28. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
Tabel 29. Realisasi Keuangan dan Kinerja Tahun 2023 (Lampiran LKPJ).....	53
Tabel 30. Realisasi Retribusi APAR Tahun 2009-2023	59
Tabel 31. Capaian Retribusi APAR Tahun 2023	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPBD Kota Tangerang.....	17
Gambar 2. Grafik Pencapaian IRB Tahun 2019-2023	27
Gambar 3. Capaian IRB Nasional, Banten, dan Kota Tangerang 2019-2023	29
Gambar 4. Edukasi, Gladi, dan Sosialisasi yang dilakukan	30
Gambar 5. Grafik Pencapaian Presentase Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2019-2023	34
Gambar 6. Proses penanganan bencana TPA Rawa Kucing.....	36
Gambar 7. Grafik Pencapaian Respon Time Tahun 2019-2023.....	39
Gambar 8. Grafik Kejadian Kebakaran Per Kecamatan Tahun 2023	43
Gambar 9. Pemadaman kebakaran yang dilakukan BPBD	44
Gambar 11. Grafik jumlah korban bencana yang pulih kembali Tahun 2019-2023	48
Gambar 12. Tampilan aplikasi SILANTANG BPBD	52

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada periode tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang memiliki satu tujuan dan tiga sasaran, sesuai dengan penetapan kinerja dan rencana strategis yang telah ditetapkan. Tujuan BPBD periode 2019-2023 adalah Meningkatkan Tata Kelola Kebencanaan dengan indikator Indeks Risiko Bencana yang pada tahun 2023 ini tercapai 103,97 poin dari target 95,2 poin atau baru tercapai 90,79% dari target.

Untuk sasaran pertama yaitu Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan indikator Presentase kelurahan tangguh bencana yang direalisasikan sesuai target yaitu 9,61% atau 10 kelurahan. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Daya Tanggap Bencana dicapai melalui indikator Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran dengan target sebesar 15 Menit/Kejadian dan direalisasikan sebesar 12,37 menit (117,5%). Untuk sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana dengan indikator Jumlah Korban Bencana yang pulih kembali dengan target sebanyak 20 orang dan direalisasikan sebesar 20 orang dan tercapai target.

Terdapat satu indikator pada indikator tujuan yaitu Indeks Risiko Bencana yang baru tercapai 103,97 poin dari target 95,2 poin (90,79%). Salah satu faktor utama ketidaktercapaian target IRB adalah penentuan target yang terlalu tinggi pada saat penyusunan indikator kinerja utama dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2023. Pada saat penentuan target tersebut masih dalam keadaan belum terjadi pandemi Covid-19. Pada saat terjadi pandemi Covid-19, BNPB memasukan parameter Covid-19 sebagai bencana non-alam sehingga berpengaruh pada risiko bencana di Indonesia khususnya Kota Tangerang.

Mengacu pada hal tersebut, di tahun 2023 ini BPBD telah berupaya meningkatkan ketahanan daerah Kota Tangerang dengan melengkapi dua dokumen kebencanaan yaitu dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan dokumen Rencana Kontijensi (Renkon). Dua dokumen tersebut turut ikut andil dalam menaikkan capaian indeks risiko bencana tahun 2023 Kota Tangerang naik dari pada tahun 2022 senilai 116,8 poin menjadi 103,97 poin di tahun 2023.

Selain itu, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam hal pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana yaitu pengetahuan masyarakat terhadap penanggulangan bencana secara mandiri demi membuat masyarakat Kota Tangerang yang memiliki ketahanan bencana yang baik. Hal tersebut juga harus

didukung dengan distribusi informasi kebencanaan yang baik dari BPBD maupun stakeholder kebencanaan lainnya di Kota Tangerang, serta tersedianya petugas lapangan yang memiliki kapasitas yang mumpuni dalam penanggulangan bencana.

Pada era digitalisasi saat ini, untuk pelaksanaan kegiatan kebencanaan yang dilakukan diperlukan terobosan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan. Pada Tahun 2023 ini BPBD memiliki inovasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, yaitu dengan menggunakan inovasi Silantang (Sistem informasi layanan tangguh). Melalui aplikasi Silantang ini, masyarakat dapat membuat permohonan layanan secara online. Beberapa layanan yang dapat dilakukan melalui SILANTANG diantaranya adalah permohonan sosialisasi dan pelatihan, permohonan pemeriksaan alat proteksi kebakaran, advice gambar bangunan, dan permohonan peminjaman sarana prasarana. Dengan adanya inovasi ini, data pengguna layanan dapat didokumentasikan secara baik dan dapat digunakan sebagai pemetaan daerah rawan maupun pengambilan keputusan berdasarkan historis layanan yang telah diberikan. Sejalan dengan hal tersebut, proses pencegahan penanganan dan penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Tangerang diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Dasar Hukum Terbentuknya Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penanganan Bencana di Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang dibentuk tahun 2016 dan mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menangani sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran maka diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 85/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah dilakukan revisi melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 152/2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Walikota Tangerang Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Korban Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.1.2 Tujuan Terbentuknya Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang terdiri atas unsur Pengarah dan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota yang di jabat secara *ex officio* Sekretaris Daerah yang bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pengarah dan unsur pelaksana. dan dalam pelaksanaanya di pimpin oleh seorang kepala pelaksana badan. Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 152 Tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk dengan tujuan untuk melakukan tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, menangani sub urusan bencana dan sub kebakaran sesuai dengan visi, misi dan program Wali Kota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.1.3 Aspek Strategis Organisasi

Dengan berpedoman pada Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang memiliki aspek strategis sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada

masyarakat dalam hal penanggulangan bencana, baik itu dalam fase pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

BPBD secara resmi berdiri pada tahun 2014 dan terdapat penambahan satu bidang sarana dan prasana bencana pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 152 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja BPBD.

1.1.4 Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi

Penyelenggaraan pelayanan bidang kebencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang secara berkesinambungan selalu dalam proses pembenahan dan perbaikan. Namun upaya tersebut masih menyisakan adanya pelayanan yang belum optimal. Terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Belum meratanya pemahaman masyarakat dalam penanganan pertama terhadap bencana.
2. Masih kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran yang dimiliki sehingga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Hambatan:

1. Adanya persepsi masyarakat tentang penanggulangan bencana yang dilakukan hanya sebatas setelah terjadi bencana saja, dan belum memiliki kesadaran tentang pentingnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana maupun kebakaran.
2. Seringnya terjadi mutasi pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang sehingga informasi dan kinerja tidak dapat secara efektif tersalurkan dan dilaksanakan.

1.1.5 Potensi Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang memiliki potensi yang besar terkait fungsi, tugas pokok dan sumber daya yang dimilikinya. Tugas pokok Badan untuk melakukan pelayanan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berpotensi untuk lebih ditingkatkan dalam rangka pelayanan prima. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan didukung oleh aset berupa mobil tangga dan mobil pemadam serta berbagai peralatan pendukung lainnya. Dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok Badan juga berasal dari sumber daya manusia yang dimiliki baik pegawai yang melaksanakan tugas administratif maupun anggota regu pemadam kebakaran yang melaksanakan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan penanggulangan bencana, potensi-potensi Badan tersebut terus dikembangkan. Aset berupa mobil dan peralatan pendukung dirawat dan diperbaharui. Sumber daya manusia diberi pendidikan dan pelatihan berjenjang sesuai jabatan dan tugasnya masing-masing. Dengan demikian diharapkan pelayanan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan semakin baik dan masyarakat dapat merasakan dampak positifnya yaitu berkurangnya kejadian bencana baik itu bencana kebakaran, dan menurunnya kerugian akibat kebakaran dan bencana banjir serta semakin sedikitnya korban akibat bencana.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1.2.1 Gambaran Umum Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 152 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang menunjukkan bahwa area inti (*core area*) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang adalah melakukan pelayanan di bidang Penanggulangan Bencana. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan dijelaskan pada bagian berikut.

1.2.2 Kedudukan

Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam struktur Pemerintah Kota Tangerang berada di bawah komando langsung dari Walikota dan Wakil Walikota Tangerang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi empat UPTD dan tiga pos pemadam. Keempat UPTD tersebut yaitu UPTD Cibodas, Batu Ceper, Ciledug, Periuk beserta tiga pos pemadam di Pinang, Benda dan Keroncong.

1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan sehari-hari, yang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, serta mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana. Fungsi Koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Fungsi Komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat kerja lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi Pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan

satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan/prabencana;
2. pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik pada saat bencana;
3. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
4. pelaksanaan pemadaman kebakaran, penyelamatan korban, inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan investigasi kejadian kebakaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
5. pelaksanaan ketatausahaan Badan;
6. pengelolaan UPT; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Badan

Sekretaris Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan.

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, sekretaris unsur pelaksana mempunyai fungsi:

1. penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
2. penatausahaan urusan keuangan;
3. penatausahaan urusan perencanaan;
4. pengoordinasian dalam penyusunan program Badan;
5. pengoordinasian dalam pembangunan dan pengembangan egovernment; dan
6. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT dilingkungan Badan.

c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, pengendalian, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;

2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan Inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran bersama UPT sesuai wilayah kerjanya;
3. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana; dan
4. pelaporan.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris, yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban bersama dengan UPT sesuai wilayah kerjanya;
3. pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
4. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
5. pelaporan.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Investigasi kejadian kebakaran dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran bersama dengan UPT sesuai wilayah tugasnya;

3. pelaksanaan penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
4. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
5. pelaporan.

f. Bidang Sarana Prasarana Bencana

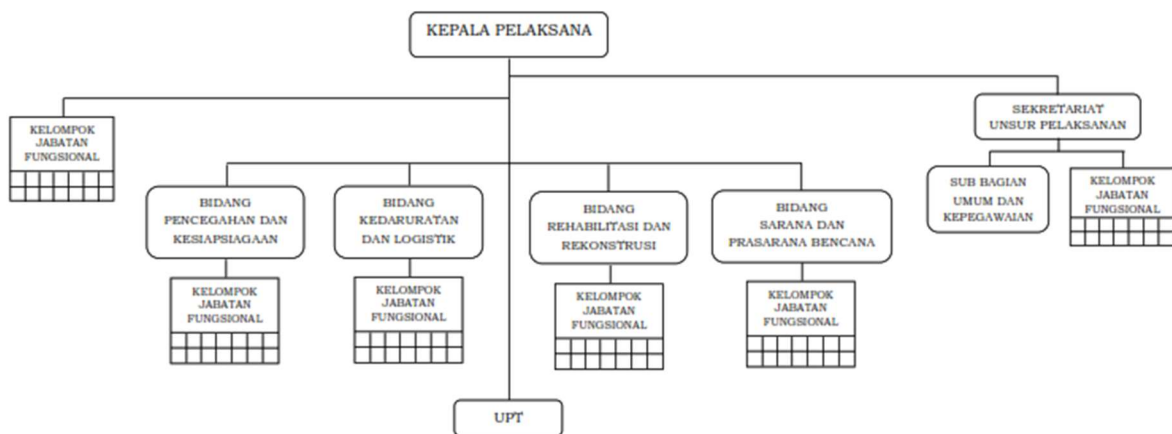
Bidang Sarana Prasarana Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup penyelenggaraan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana bencana. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Sarana Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana bencana;
2. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana prasarana bencana dengan bidang lain dan UPT sesuai dengan wilayah kerjanya;
3. pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana bencana;
4. pelaksanaan hubungan kerja di bidang sarana prasarana bencana dengan instansi terkait; dan
5. pelaporan.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada gambar I.1. mengenai struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bawah ini.

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris Badan yang membawahi tiga sub bagian dan empat bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi serta Bidang Sarana Prasarana Bencana sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 152 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPBD Kota Tangerang

Sumber: Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 152 Tahun 2021

Adapun keterangan mendetail mengenai jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Pendidikan Terakhir, Golongan/Pangkat, Esselon dan Diklat yang telah diikuti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kondisi Pegawai BPBD Kota Tangerang Tahun 2023

No	NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT					PENDIDIKAN PELATIHAN STUKTURAL			
		ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	NON PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Kepala Pelaksana	V									1						1		V		
2	Sekretaris Badan	V									1						1			V	
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	V									1						1			0	
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	V									1						1			V	
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	V									1					1				V	
6	Kepala Bidang Sarana Prasarana Bencana	V									1						1			V	
7	Kepala Subag Umum dan Kepegawaian	V								1						1					V
8	Kepala Subag Perencanaan	V								1						1					V
9	Kepala Subag Keuangan	V									1					1					V
10	Kasi Kesiapsiagaan	V								1						1					V
11	Kasi Pencegahan	V								1						1					V
12	Kasi Kedaruratan	V								1						1					V

No	NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT					PENDIDIKAN PELATIHAN STUKTURAL			
		ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	NON PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13	Kasi Logistik	V								1						1					V
14	Kasi Rehabilitasi	V								1						1					V
15	Kasi Rekontruksi	V								1						1					V
16	Kasi Pengadaan Sarana Prasarana Bencana	V									1					1					V
17	Kasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bencana	V								1						1					V
18	Kepala UPTD Batuceper	V								1						1					V
19	Kepala TU UPTD Batuceper	V								1						1					V
20	Kepala UPTD Cibodas	V								1						1					0
21	Kepala TU UPTD Cibodas	V								1						1					0
22	Kepala UPTD Ciledug	V								1						1					0
23	Kepala TU UPTD Ciledug	V								1						1					0
24	Kepala UPTD Priuk	V								1						1					V
25	Kepala TU UPTD Periuk	V								1						1					V
Jabatan yang terisi		25								17	8					20	5		1	4	15
Fungsional		1								1											
Staf PNS		36		5	3	19			2	6	2			6	18	13					
Staf TKK		0																			
Total pegawai		380		5	3	19			2	25	8		318	6	18	32	6				

Sumber: BPBD Kota Tangerang, 2023

Dari hasil analisis pegawai yang dilakukan, untuk sebaran pegawai PNS rata-rata berlatar Pendidikan sarjana. Sedangkan untuk pegawai THL termasuk anggota lapangan rata-rata berlatar pendidikan menengah (SMA).

1.4 Aset

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki sejumlah aset yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Jumlah aset yang digunakan dan tidak digunakan berdasarkan tahun pengadaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Aset BPBD Kota Tangerang

No Urut	Aset SKPD	Satuan	Kondisi			Tahun Perolehan	Nilai perolehan
			Baik	Sedang	Rusak		
1	TANAH			3		2003-2005	1.882.500.000
2	PERALATAN DAN MESIN			4.185			50.571.171.722

No Urut	Aset SKPD	Satuan	Kondisi			Tahun Perolehan	Nilai perolehan
			Baik	Sedang	Rusak		
	a. Alat Besar	Unit		486		2007-2015	3.715.904.531
	b. Alat Angkutan	Unit		160		1994-2018	33.376.270.122
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	Unit		108		2003-2018	725.601.221
	d. Alat Pertanian	Unit		26		2005-2015	31.141.580
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	Unit		1.741		1996-2015	7.319.481.950
	f. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	Unit		98		2006-2018	645.024.351
	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	Unit		2			40.721.760
	h. Alat laboratorium	Unit		15		2004-2013	466.801.000
	i. Alat Persenjataan	Unit		29		2005-2018	71.338.700
	j. Komputer	Unit		131		2005-2018	1.150.839.787
	k. Alat Eksplorasi						
	l. Alat Pengeboran						
	m. Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian						
	n. Alat bantu eksplorasi						
	o. Alat keselamatan kerja	Unit		1.373		2013-2018	2.799.576.719
	p. Alat Peraga						
	q. Peralatan Proses Produksi						
	r. Rambu-rambu	Unit		16		2005-2018	228.470.000
	s. Peralatan Olahraga						
3	GEDUNG DAN BANGUNAN			18			8.891.148.466
	a. Bangunan Gedung	Gedung		14		2003-2018	8.390.357.420
	b. Monumen						
	c. Bangunan Menara						
	d. Tugu Titik Kontrol Pasti			4		2015	500.791.046
4	JALAN, IRIGASI, INSTALASI DAN JARINGAN						
	a. Jalan dan Jembatan						
	b. Bangunan Air						
	c. Instalasi						
	d. Jaringan						
5	ASET TETAP LAINNYA			21			27.900.000
	a. Bahan Perpustakaan	Buku		21		2008-2009	27.900.000
	b. Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Olahraga						
	c. Hewan						
	d. Biota Perairan						
	e. Tanaman						
	f. Barang Koleksi non Budaya						
	g. Aset tetap dalam Renovasi						
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan						
7	ASET LAINNYA						
	a. Kemitraan dengan pihak ketiga						
	b. Aset tidak berwujud						
	c. Aset lain-lain						
	Jumlah			4.227			61.372.720.188

Sumber: BPBD Kota Tangerang, 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Tahun 2023

Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja merupakan dua hal yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan. Rencana strategis menjadi pedoman rencana program dan kegiatan selama lima tahun. Sedangkan penetapan kinerja Badan dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan rencana program dan kegiatan ditahun terkait.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang 2019-2023. Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk kedalam misi ke-1 pembangunan Kota Tangerang dengan tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Kebencanaan” pada sasaran “Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, Meningkatnya Daya Tanggap bencana dan Meningkatnya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana”.

Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam dokumen Rencana Strategis tersebut terlihat keterkaitan antara visi dan misi dengan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara garis besar selama 5 tahun.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan IKU Perangkat Daerah

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang periode 2019-2023 adalah: “Meningkatkan Tata Kelola Kebencanaan”. Tujuan tersebut menitik beratkan pada aspek Profesional yang memiliki makna bahwa seluruh aparatur BPBD dalam melayani masyarakat di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana hendaknya mengedepankan keterampilan dan keahlian sesuai bidang tugasnya dengan selalu berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku tanpa diskriminasi. Selain itu, menitikberatkan pada aspek Tangguh berarti merujuk kepada kondisi masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran akan risiko bencana. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan baik terhadap risiko bencana melalui praktek-praktek mitigasi bencana di segala aspek kehidupan.

Masyarakat diharapkan senantiasa siap siaga dalam menghadapi potensi bencana, termasuk tanggap dalam kondisi darurat. Mereka diharapkan mampu mempertahankan struktur dan fungsi-fungsi dasar pada saat bencana, serta mampu memulihkan diri melalui dukungan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan sarana prasarana yang memadai dari pemerintah. Pada akhirnya, masyarakat tangguh bencana adalah masyarakat yang mampu berperan aktif sebagai mitra bersama pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana.

a. Indikator Tujuan

Tujuan yang telah ditetapkan diatas akan dicapai melalui indikator tujuan yaitu indeks risiko bencana

b. Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan di atas maka disusunlah sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
2. Meningkatnya daya tanggap bencana;
3. Meningkatnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

c. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang dalam periode 2019-2023 ini adalah untuk:

1. Persentase Kelurahan Tangguh Bencana;
2. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran;
3. Jumlah Korban Bencana yang pulih kembali

d. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang berdasarkan Renstra BPBD Kota Tangerang Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Kelurahan Tangguh Bencana;
2. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran;
3. Jumlah Korban Bencana yang pulih kembali

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama BPBD berdasarkan Renstra tahun 2019-2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Penjelasan/Formulasi
1.	Meningkatkan Tata Kelola Kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	Poin	Nilai indeks risiko bencana sesuai dengan perhitungan BNPB
	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	Persentase	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana setiap tahunnya
	Meningkatnya daya tanggap bencana	Tingkat waktu tanggap (Respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Menit/Kejadian	Rata - rata waktu respon yang dibutuhkan dalam menanganani kejadian kebakaran
	Meningkatnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah korban bencana yang pulih kembali	Orang	Korban bencana yang dipulihkan traumanya melalui trauma healing

Sumber: Renstra BPBD Tahun 2019-2023

2.2 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji Badan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi/OPD; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan atasannya yaitu Wali Kota Tangerang atau sebagai *Performance Agreement*. Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran sehingga dibuat setelah proses penganggaran selesai.

Perjanjian kinerja (perubahan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023 yang ditandatangani pada bulan November Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja (perubahan) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Tata Kelola Kebencanaan	Indeks Risiko Bencana	95,2 poin
1.1	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana;	9.61
1.2	Meningkatnya daya tanggap bencana;	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran:	15 Menit
1.3	Meningkatnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.	Jumlah Korban Bencana yang pulih kembali	20 Orang
No	Program	Anggaran (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.007.134.983	
2	Program Penanggulangan Bencana	1.357.127.840	
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Korban	2.425.533.500	
	Total	39.789.796.323	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja pada setiap sasaran, maka digunakanlah pengukuran sebagai berikut.

Tabel 5. Rentang Capaian dan Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90,99\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75,99\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65,99\%$	Rendah
5	$\leq 50,99\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasi indikator kinerja.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Tangerang Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Tata Kelola Kebencanaan	Indeks Risiko Bencana	95,2 point	103,97 point*	90,79
A	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	9,61%	9,61%	100
B	Meningkatnya daya tanggap bencana	Tingkat waktu tanggap (Respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	15 Menit	12,37 Menit	117,5
C	Meningkatnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah korban bencana yang pulih kembali	20 Orang	20 Orang	100
Rata-rata capaian					102,07

* Capaian berdasarkan portal Inarisk BNPB, hasil akhir berdasarkan buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023 belum dapat diketahui karena Buku IRBI Tahun 2023 hingga dokumen ini disusun belum terbit.

Sumber: BPBD Kota Tangerang, 2024

3.1 Sasaran Strategis 1 (Tujuan)

**Sasaran Strategis 1 (tujuan):
Meningkatnya Tata Kelola Kebencanaan**

Meningkatnya tata kelola kebencanaan yang menjadi tujuan dari BPBD Kota Tangerang. Berdasarkan Renstra Tahun 2019-2023, BPBD memiliki indikator kinerja Indeks Risiko Bencana (indikator negatif). Indikator tersebut merupakan tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia (Kota Tangerang) sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (*multi hazard*) tersebut. Indeks Risiko Bencana masing-masing kabupaten/kota yang dinilai oleh BNPB melalui pendekatan kajian risiko bencana berdasarkan analisa bahaya, kerentanan dan kapasitas dari suatu daerah. Indeks Risiko Bencana tersebut merupakan indikator negatif dimana setiap daerah perlu berupaya untuk selalu menurunkan risiko bencana di daerahnya masing-masing.

Tabel 6. Evaluasi Pencapaian Tujuan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2023			Target akhir Renstra
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	2023
Meningkatkan Tata Kelola Kebencanaan	Indeks Risiko Bencana	Poin	136	136	132,8	116,8	95,2	103,97	90,79	95,2 poin

Sumber: BPBD Kota Tangerang, 2024

3.1.1 Uraian Pencapaian Tujuan

Tabel 7. Pengukuran Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023

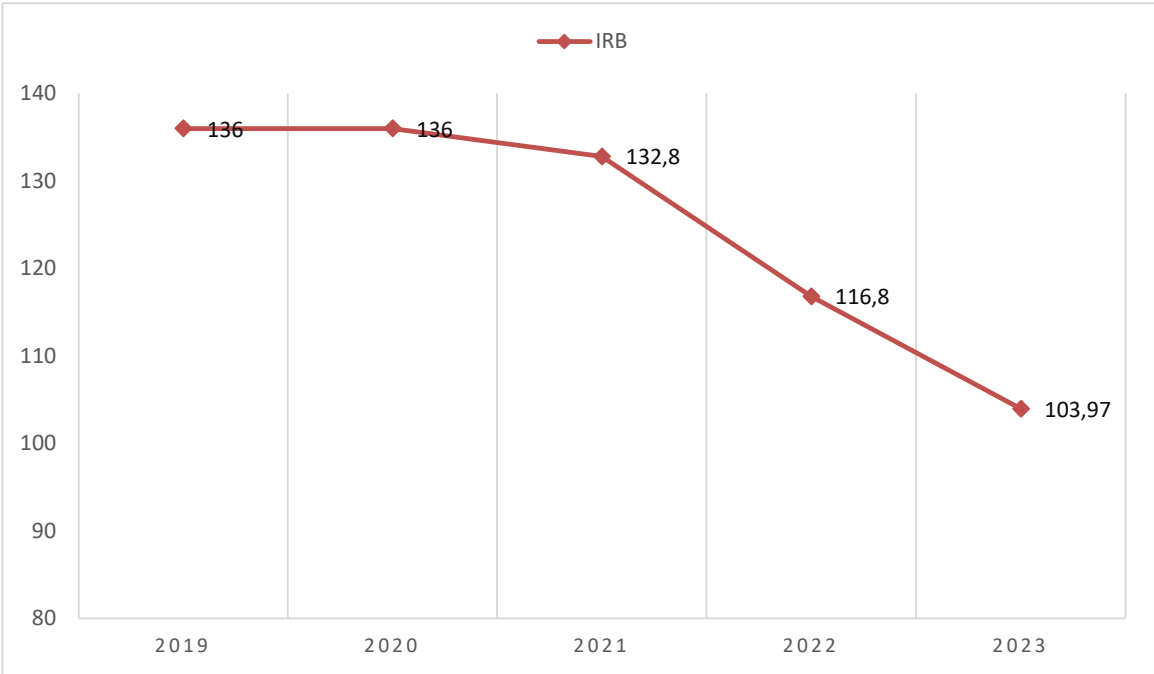
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	%
Meningkatkan Tata Kelola Kebencanaan	Indeks Risiko Bencana	Poin	95,2	103,97	90,79

Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana dengan target tahun 2023 sebesar 95,2 poin direalisasikan sebesar 103,97 poin. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi indeks risiko bencana yang ada di Kota Tangerang mencapai 90,79% dari target. Indeks Risiko Bencana yang digunakan adalah indikator yang mengacu kepada buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan data portal Inarisk BNPB. Inarisk adalah portal hasil kajian risiko yang menggunakan *arcgis server* sebagai *data services* yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik, potensi kerugian

ekonomi dan potensi kerusakan lingkungan dan terintegrasi dengan realisasi pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana sebagai *tool monitoring* penurunan indeks risiko bencana.

Tabel 8. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2023			Target Akhir Renstra (2023)
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	
Meningkatkan Tata Kelola Kebencanaan	Indeks Risiko Bencana	Poin	136	136	132,8	116,8	95,2	103,97	90,79	90,79



Gambar 2. Grafik Pencapaian IRB Tahun 2019-2023

Mengacu pada Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setiap tahunnya yang mendorong pemerintah daerah untuk dapat berupaya dalam menurunkan Indeks Risiko Bencana setiap tahunnya. Capaian IRB Kota Tangerang tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang menurun. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dari target 95,2 poin belum dapat dicapai dengan realisasi 116,8 poin, sedangkan di tahun 2023 walaupun belum dapat mencapai target, IRB Kota Tangerang naik menjadi 103,97 poin. Mengacu pada target akhir renstra periode 2019-2023, Indeks Risiko Bencana memiliki target akhir sebesar 95,2 poin. Dalam periode tahun 2023 dengan realisasi indikator sebesar 103,97 poin

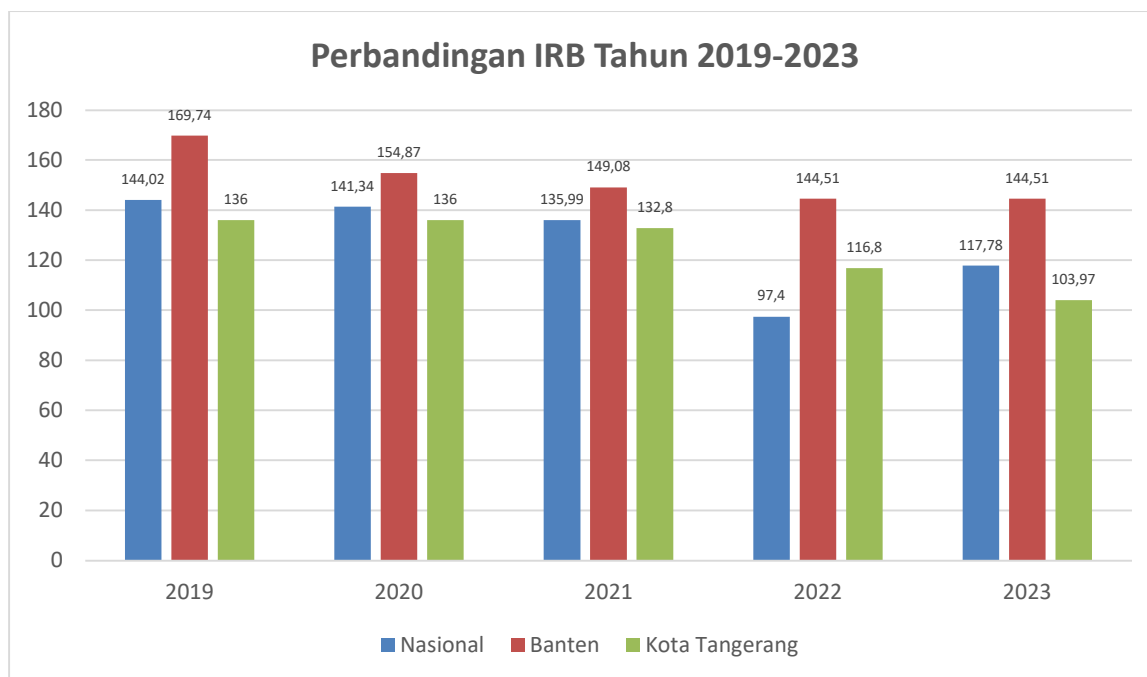
menunjukkan indikator tersebut belum dapat direalisasikan dan hanya mencapai 90,79% dari target.

Salah satu faktor utama ketidaktercapaian target IRB adalah penentuan target yang terlalu tinggi pada saat penyusunan Rencana Strategis Tahun 2019-2023. Pada saat penentuan target tersebut masih dalam keadaan belum terjadi pandemi Covid-19. Pada saat terjadi pandemi Covid-19, BNPB memasukan parameter Covid-19 sebagai bencana non-alam sehingga berpengaruh pada risiko bencana di Indonesia khususnya Kota Tangerang. Hal ini akan menjadi evaluasi bagi penentuan target IRB dalam target IKU Kepala Daerah tahun 2024.

Mengacu pada target akhir Renstra periode 2019-2023, Indeks Risiko Bencana memiliki target akhir sebesar 95,2 poin. Dalam periode tahun 2023 dengan realisasi indikator sebesar 103,97 poin menunjukkan indikator tersebut belum dapat direalisasikan dan hanya mencapai 90,79% dari target. Meskipun nilai Indeks Risiko Bencana belum mencapai target, diharapkan pada tahun 2024 indikator tersebut dapat lebih baik dari tahun 2023. Adapun salah satu utama dalam penurunan Indeks Risiko Bencana yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dimana pada tahun 2023 IKD Kota Tangerang mengalami kenaikan dari 0,59 poin (kategori sedang) naik dari tahun sebelumnya yaitu 0,55 poin (kategori sedang).

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Provinsi & Nasional

Indeks risiko bencana adalah indikator yang dapat dibandingkan kinerjanya dengan rata-rata nasional dikarenakan adanya fasilitasi BNPB dalam perhitungan indikator tersebut. Dibawah ini disajikan grafik indeks risiko rata-rata nasional yang bersumber dari portal Inarisk BNPB.



Gambar 3. Capaian IRB Nasional, Banten, dan Kota Tangerang 2019-2023

Sumber: BNPB, 2024

Bila dilihat dari grafik perbandingan berikut, Kota Tangerang (103,97) memiliki Indeks Risiko Bencana dibawah rata-rata nasional (117,78). Sedangkan dan Provinsi Banten (144,51) memiliki nilai Indeks Risiko Bencana diatas rata-rata nasional (117,78). Hal ini menunjukkan tingkat risiko bencana yang ada relatif dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang bila dibandingkan dengan rata-rata risiko bencana tingkat nasional dan provinsi.

Bila dilihat dari rata-rata nasional dari perhitungan BNPB Tahun 2023 memiliki nilai 117,78 poin. Hal ini menunjukkan indeks risiko bencana Kota Tangerang tahun 2023 masih lebih baik dari rata-rata nasional dengan nilai 103,97 poin.

Tabel 9. Perbandingan IRB Nasional dan Kota Tangerang

Indikator Kinerja	Satuan	Nasional	Kota Tangerang
		Realisasi	Realisasi
Indeks Risiko Bencana	Poin	117,78	103,97

Sedangkan untuk perbandingan dengan Provinsi Banten, pada portal Inarisk BNPB tidak terdapat level Provinsi sehingga masih mengacu pada Buku IRBI 2022. Bila dilihat dari IRB Provinsi Banten Tahun 2022 memiliki nilai 144,51 poin. Hal ini menunjukkan indeks risiko bencana Kota Tangerang tahun 2023 masih lebih baik dari Provinsi Banten dengan nilai 103,97 poin.

Tabel 10. Perbandingan IRB Provinsi Banten dan Kota Tangerang

Indikator Kinerja	Satuan	Provinsi Banten*	Kota Tangerang
		Realisasi	Realisasi
Indeks Risiko Bencana	Poin	144,51	103,97

3.1.2 Upaya Yang Telah Dilakukan

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung kinerja indeks risiko bencana yang dilakukan di tahun 2023, yaitu:

1. Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana bagi masyarakat maupun bagi aparaturnya di lingkungan Kota Tangerang;
2. Edukasi pada instansi pendidikan baik berupa kunjungan ke kantor BPBD maupun permohonan edukasi di lingkungan sekolah;
3. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana di lingkup perusahaan dan instansi pemerintah di lingkungan Kota Tangerang;
4. Menyusun dokumen kebencanaan yang menjadi unsur dasar penanggulangan bencana di daerah yaitu, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Dokumen Rencana Kontijensi (banjir).



Gambar 4. Edukasi, Gladi, dan Sosialisasi yang dilakukan

Pada tahun 2023 terdapat beberapa program yang mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Utama tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

Tabel 11. Program Pendukung Pelaksanaan Indikator

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	97.735.800	79.890.000
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 orang	300 orang
2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	252.176.900	218.276.000
	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen
3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	331.131.540	310.109.500
	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	300 orang	300 orang
4	Penyusunan Rencana Kontijensi	154.184.600	142.621.000
	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	461.840.000	447.874.000
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket

3.1.3 Permasalahan Yang Dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut diantaranya adalah:

1. Belum meratanya pemahaman masyarakat dalam penanganan pertama terhadap bencana;
2. Masih terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran yang ada.
3. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder dalam hal kebencanaan.

3.1.4 Solusi Terhadap Permasalahan

Bertolak dari permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka Upaya yang akan dilakukan yaitu:

1. Melakukan simulasi dan pelatihan bagi warga negara dan masyarakat dalam penanganan bencana, dan melaksanakan sosialisasi secara masif kepada

masyarakat melalui program Kelurahan Tangguh Bencana, media sosial (Instagram, youtube, dan facebook) dan melaksanakan pelatihan baik kepada warga masyarakat maupun aparatur.

2. Melakukan inventarisasi peralatan dan kendaraan dan melakukan perhitungan kebutuhan sarana prasarana tiap tahunnya sebagai usulan pengadaan sarana prasarana kepada instansi pusat maupun daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan sarana prasarana kebencanaan.
3. Akan mengoptimalkan koordinasi melalui forum Pengurangan Risiko Bencana dan koordinasi informal secara rutin antar *stakeholder* dalam hal kebencanaan. Selanjutnya perlu juga peran serta aktif *stakeholder* dalam memberi masukan kepada dokumen-dokumen kebencanaan yang disusun oleh BPBD agar terjadi koordinasi yang baik dalam hal penanggulangan bencana baik secara regulasi maupun koordinasi langsung di lapangan.

3.2 Sasaran Strategis 2 (Sasaran 1)

**Sasaran Strategis 2 (sasaran 1):
Meningkatnya pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana**

Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dicapai melalui indikator persentase kelurahan tangguh bencana. BPBD melakukan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat Kota Tangerang. Hal ini diantaranya dilakukan melalui kelurahan tangguh bencana yang ditargetkan 9,61% atau 10 kelurahan di tahun 2023.

Tabel 12. Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

[illegible]



Gambar 5. Grafik Pencapaian Presentase Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2019-2023

Bila dilihat dari target akhir periode Renstra 2019-2023 adalah sebesar 43,25% atau sebanyak 45 kelurahan dari total 104 kelurahan di Kota Tangerang. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sudah tercapai realisasi sebanyak 45 kelurahan atau 43,25%. Mengacu pada target akhir Renstra periode 2019-2023, Persentase kelurahan tangguh bencana memiliki target akhir sebesar 43,25% atau 45 kelurahan. Dalam periode tahun 2023 dengan realisasi indikator akhir sebesar 43,25% atau 45 kelurahan menunjukkan indikator tersebut sudah dapat direalisasikan sesuai dengan target.

Pada periode Renstra 2024-2026, indikator ini tetap menjadi sasaran BPBD Kota Tangerang dikarenakan kelurahan yang terbentuk masih 45 kelurahan dari total 104 kelurahan di Kota Tangerang. Pembentukan kelurahan tangguh bencana diharapkan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat secara mandiri terhadap bencana di Kota Tangerang.

3.2.2 Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk menjadikan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana yaitu membentuk Kelurahan Tangguh Bencana. Sebanyak 10 kelurahan dibentuk di Tahun 2023 dengan mencakup kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi untuk bencana banjir, kebakaran serta kedaruratan lainnya.

Dalam pelaksanaan pencapaian sasaran ini, ditunjang oleh beberapa sub kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana seperti tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 15. Program Pendukung Pelaksanaan Indikator

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Target	Realisasi
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	97.735.800	79.890.000
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 orang	300 orang
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	331.131.540	310.109.500
	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	300 orang	300 orang
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	461.840.000	447.874.000
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket

Pada tahun 2023 terdapat kejadian bencana kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing di Kecamatan Neglasari. Musibah tersebut juga ditetapkan sebagai status darurat bencana tingkat Kota sesuai dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 443/Kep.1023-BPBD/2023 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Tempat Pembuangan Akhir Sampah Rawa Kucing dari tanggal 20 Oktober – 2 November 2023. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut BPBD Kota Tangerang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BNPB sebagai stakeholder utama, dan

stakeholder lainnya yang terdiri dari perangkat daerah maupun instansi lainnya baik di wilayah Kota Tangerang maupun diluar wilayah Kota Tangerang.



Gambar 6. Proses penanganan bencana TPA Rawa Kucing

Selain itu rutin dilakukan monitoring sebagai antisipasi bencana banjir. Hal yang dilakukan diantaranya dengan mengecek ketinggian air di setiap DAS yang melintas di Kota Tangerang seperti DAS Angke, Ciledug Indah, DAS Cisadane, DAS Kali Ledug, dan DAS Kali Cirarab. Monitoring dilakukan pada saat kondisi di Kota Tangerang dan di hulu Bogor hujan. Selain itu monitoring juga dilakukan di daerah rawan banjir seperti wilayah Perumahan Total Persada, Jembatan Tol Persada, Perumahan Ciledug Indah, Kelurahan Gaga, Rawa Bamban, Bendungan Polor, Fly Over Cibodas, Panunggangan Barat, Candulan, Pergudangan Busa Indah, dan daerah-daerah rawan lainnya di Kota Tangerang. Data banjir dan kejadian bencana lainnya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi kejadian bencana tahun 2023 berikut ini.

Tabel 16. Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Kedaruratan Tahun 2023

No	Bulan	Banjir	Cuaca Ekstrem	Gempa Bumi	Monitoring Dampak Cuaca
1	Januari	2	1	0	13
2	Februari	6	3	1	41

No	Bulan	Banjir	Cuaca Ekstrem	Gempa Bumi	Monitoring Dampak Cuaca
3	Maret	2	2	0	67
4	April	1	1	0	6
5	Mei	0	0	0	21
6	Juni	0	0	0	28
7	Juli	0	0	0	23
8	Agustus	0	0	0	0
9	September	0	0	0	1
10	Oktober	0	0	0	0
11	November	0	0	0	17
12	Desember	0	0	0	26
	Total	11	7	1	243

3.2.3 Permasalahan Yang Dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, untuk mencapai pemenuhan persentase Kelurahan Tangguh Bencana seperti:

1. Belum meratanya pengetahuan aparaturnya dan pegawai BPBD yang memberikan sosialisasi dan pelatihan dan belum diterapkan standar informasi sosialisasi dan pelatihan yang perlu diberikan, sehingga pengetahuan yang disalurkan kurang maksimal;
2. Sarana prasarana pelatihan dan peragaan pada saat sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan BPBD masih terbatas;
3. Belum ada tindak lanjut dari BPBD terhadap pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan.

3.2.4 Solusi Terhadap Permasalahan

Bertolak dari permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka upaya yang akan dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas aparaturnya BPBD melalui kegiatan pelatihan dengan mengundang narasumber ahli kebencanaan agar kapasitas pengetahuan pegawai dapat tersebar merata;
2. Mengalokasikan Sarana prasarana pencegahan dan kesiapsiagaan perlu menjadi prioritas agar dapat mendukung pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan;

3. Melengkapi media pendukung lain dalam hal pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan (poster, rambu bencana, penggunaan media sosial dll) di wilayah yang menjadi kawasan rawan bencana.

3.3 Sasaran Strategis 3 (Sasaran 2)

**Sasaran Strategis 3 (sasaran 2):
Meningkatnya daya tanggap bencana**

Meningkatnya daya tanggap bencana dicapai melalui indikator tingkat waktu tanggap (response time rate) kebakaran. Indikator ini mengacu pada kecepatan respon anggota di lapangan pada saat terjadi kebakaran. Tingkat waktu tanggap dihitung dari saat laporan diterima hingga anggota tiba di lokasi kejadian dan siap melakukan pemadaman.

Tabel 17. Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2023			Target akhir Renstra
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya daya tanggap bencana	Tingkat waktu tanggap (Respon time rate)	Menit	14,91	14,10	12,99	14,65	15	12,37	117,5	15 menit

3.3.1 Uraian Pencapaian Tujuan

Tabel 18. Pengukuran Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023

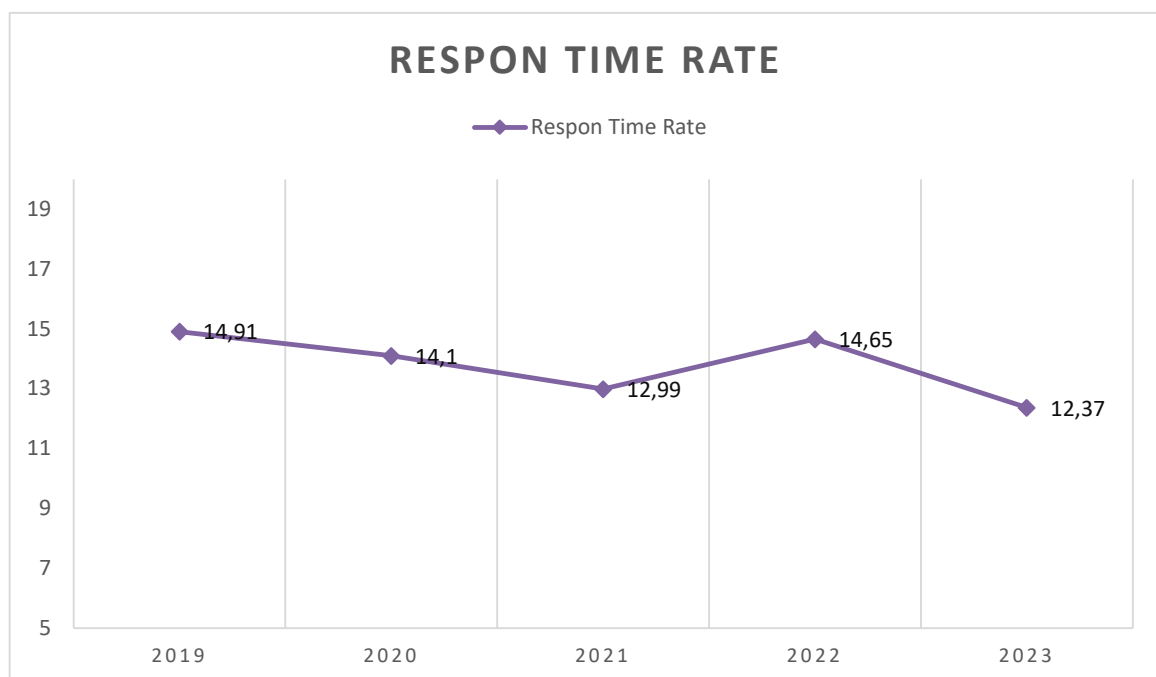
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya daya tanggap bencana	Tingkat waktu tanggap	Menit	15	12,37	117,5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	%
	(Respon time rate)				

Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Tanggap Bencana dicapai melalui indikator Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran dengan target tahun 2023 sebesar 15 Menit/Kejadian dan direalisasikan sebesar 12,37 menit (117,5%). Hal ini menunjukkan bahwa semua rata-rata kejadian kebakaran di Kota Tangerang dapat ditangani dalam waktu kurang dari 15 menit.

Tabel 19. Analisis Pencapaian Target Akhir 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2023			Target Akhir Renstra (2023)
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya daya tanggap bencana	Tingkat waktu tanggap (Respon time rate)	Menit	14,91	14,10	12,99	14,65	15	12,37	117,5	15 menit



Gambar 7. Grafik Pencapaian Respon Time Tahun 2019-2023

Bila dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2022 sebesar 14,65 menit di tahun 2023 ini capaian lebih baik yaitu 12,37 menit. Sedangkan bila dilihat dari capaian tahun 2019-2023 secara fluktuatif berada di angka 14-12 menit, akan tetapi selalu berada dibawah 15 menit.

Mengacu pada target akhir tahun pelaksanaan Resntra 2019-2023 dapat direalisasikan lebih baik dari target yaitu 12,37 menit dengan presentase capaian sebesar 117,5%. Pada periode Renstra 2024-2026, indikator ini tetap menjadi sasaran BPBD Kota Tangerang dikarenakan waktu respon BPBD Kota Tangerang terhadap kebakaran sangat penting dalam upaya pemadaman dan penanggulangan kebakaran demi meminimalisir kerugian baik itu materi maupun korban jiwa.

3.3.2 Upaya Yang Telah Dilakukan

Adapun upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lain yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama tahun 2023, melalui:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, berupa pengadaan alat-alat pemadam kebakaran untuk penanggulangan kebakaran seperti nozzle, selang, alat perlindungan diri pemadam kebakaran dan pompa pemadam kebakaran;
2. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Tahun 2023 dilakukan operasi pemadaman kebakaran sebanyak 310 kali di Kota Tangerang.
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, berupa pemeliharaan dan bahan bakar untuk unit dan peralatan operasional.
4. Mempersiapkan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan terhadap aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan korban yang meliputi pelatihan di gedung tinggi/ vertikal rescue, korban kebakaran/ *fire rescue* dan korban banjir/ *water rescue*, melalui kegiatan Peningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan bencana meliputi:
 - melakukan pengecekan dan persiapan peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi korban;
 - melakukan monitoring daerah rawan bencana;
 - koordinasi dengan OPD terkait dalam penanganan bencana melalui kegiatan koordinasi perencanaan serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dalam pelaksanaan pencapaian sasaran ini, ditunjang oleh Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebagai program utama dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

sebagai pergoram pendukung yang mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Utama tersebut dengan anggaran sebagai sebagai berikut.

Tabel 20. Program Pendukung Pelaksanaan Indikator

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Target	Realisasi
1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	816.090.000	814.994.770
	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	645.130.000	644.125.472
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	964.313.500	949.198.200
	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 unit	5 unit
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	461.840.000	447.874.000
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket

Bencana kebakaran yang terjadi selama tahun 2023 sebanyak 310 kejadian kebakaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Rekap Kejadian Kebakaran Tahun 2023

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	TANGERANG	4	1	1	3	2	0	1	4	9	5	3	0	33
2	PERIUK	4	1	1	2	2	2	4	2	4	6	4	1	33
3	CIBODAS	0	1	1	1	0	1	1	4	7	1	2	1	20

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	
4	KARAWACI	2	0	2	2	1	4	3	3	4	2	0	2	25
5	JATI UWUNG	0	1	2	2	4	2	2	1	7	4	2	4	31
6	NEGLASARI	1	1	1	0	4	1	1	0	4	5	10	0	28
7	BATUCEPER	1	0	1	0	2	3	0	0	8	2	0	2	19
8	BENDA	2	0	0	1	2	0	0	5	2	2	0	0	14
9	CILEDUG	1	0	1	0	0	0	0	2	0	3	0	3	10
10	LARANGAN	1	0	0	1	2	2	1	1	5	1	1	0	15
11	KARANG TENGAH	2	1	0	0	3	4	0	2	10	9	1	0	32
12	PINANG	1	0	1	2	1	0	1	2	11	4	0	6	29
13	CIPONDOH	0	2	1	2	0	1	2	1	3	5	0	4	21
	JUMLAH	19	8	12	16	23	20	16	27	74	49	23	23	310

Sumber: BPBD, 2024



Gambar 8. Grafik Kejadian Kebakaran Per Kecamatan Tahun 2023

Dari grafik kejadian kebakaran di atas, dapat digambarkan bahwa selama tahun 2023 kejadian kebakaran paling banyak terjadi di Kecamatan Tangerang dan Periuk dengan total 33 kejadian kebakaran. Sedangkan rekapitulasi capaian waktu tanggap (respon time rate) di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Capaian Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) di Tahun 2023

No	Bulan	Respon Time	Satuan
1	Januari	13,684	Menit
2	Februari	19,125	Menit
3	Maret	13,250	Menit
4	April	13,750	Menit
5	Mei	12,739	Menit
6	Juni	12,400	Menit
7	Juli	12,875	Menit
8	Agustus	12,111	Menit
9	September	11,568	Menit

No	Bulan	Respon Time	Satuan
10	Oktober	11,490	Menit
11	November	12,435	Menit
12	Desember	11,435	Menit
	Respon Time Rate Tahun 2023	12,37	Menit

Sumber: BPBD, 2024

Dapat dilihat dalam tabel, waktu tanggap tertinggi terdapat di Bulan Februari dengan rata-rata capaian sebesar 19,125 menit. Lamanya waktu respon tersebut terjadi dikarenakan pada saat bersamaan sedang terjadi kejadian banjir, hal tersebut berdampak pada kesiapan anggota di lapangan yang terpecah konsentrasinya sehingga waktu tanggap yang dicapai menjadi lebih lama dari biasanya.



Gambar 9. Pemadaman kebakaran yang dilakukan BPBD

Selain kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang menangani kejadian kedaruratan lain, diantaranya adalah yaitu evakuasi sarang tawon, evakuasi hewan, pohon tumbang, evakuasi korban/mayat. Kejadian kedaruratan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23. Rekap Kejadian Kedaruratan Tahun 2023

N o	Bulan	Kebakaran	Evakuasi Sarang Tawon	Evakuasi Pohon Tumbang	Pelepasan Cincin	Bantuan Pemangkasan Pohon	Bantuan Penyemprotan Pembersihan	Bantuan Pencarian Barang Milik Pribadi	Evakuasi Korban	Penyelamatan Korban	Evakuasi Hewan	Penyelamatan Hewan
1	Jan	19	52	4	4	11	1	4	1	0	23	6
2	Feb	8	46	20	6	10	1	4	0	1	26	4
3	Mar	12	49	6	5	1	4	5	2	0	20	1
4	Apr	16	14	3	8	0	4	3	4	0	21	8
5	Mei	23	57	6	9	0	5	4	1	2	26	3
6	Jun	20	17	3	8	0	23	4	3	3	19	6
7	Jul	16	10	5	12	0	33	5	0	2	23	6
8	Agt	27	16	2	4	2	106	2	0	0	23	6
9	Sep	74	18	1	7	1	33	7	0	0	20	5
10	Okt	49	10	0	3	0	2	3	0	3	19	11
11	Nov	23	9	6	13	0	5	3	2	1	26	2
12	Des	23	17	6	10	0	7	5	15	12	270	63
	Total	310	315	62	89	25	224	49	28	24	516	121

Sumber: BPBD, 2024

3.3.3 Permasalahan Yang Dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, untuk mencapai Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran seperti:

1. Lokasi kejadian kebakaran jauh dari upt/kantor pemadam terdekat sehingga membutuhkan waktu cukup lama.
2. Belum terbentuknya relawan kebakaran secara formal di Kota Tangerang untuk mempercepat respon time.
3. Kejadian kebakaran terjadi pada waktu jam sibuk, sehingga kemacetan di jalan dapat memperlambat respon time.
4. Masyarakat yang menyaksikan kejadian kebakaran dapat mengganggu proses pemadaman berlangsung.

3.3.4 Solusi Terhadap Permasalahan

Bertolak dari permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka upaya yang akan dilakukan yaitu:

1. Masih diperlukan pos-pos tambahan untuk mendukung pelaksanaan pemadaman kebakaran dan kedaruratan untuk UPT yang sudah ada. Walaupun

2. Pembentukan relawan kebakaran di tingkat kecamatan dan kelurahan dan mengoptimalkan tim Kelurahan Tangguh Bencana untuk menanggulangi kebakaran secara mandiri sebelum petugas BPBD sampai di lokasi kejadian dan dapat meminimalisir dampak kejadian kebakaran;
3. Perlu koordinasi lebih baik dengan dinas perhubungan maupun kepolisian dalam mobilisasi mobil pemadam kebakaran pada saat terjadi kejadian kebakaran;
4. Penerapan standar operasional prosedur harus diimplementasikan dengan baik oleh anggota di lapangan, dan diperlukan pemahaman bagi masyarakat tentang keamanan di sekitar lokasi kejadian.

**Sasaran Strategis 4 (sasaran 3):
Meningkatnya Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana**

Tabel 24. Evaluasi Pencapaian Tujuan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2023			Target akhir Renstra
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	Tahun 2023
Meningkatnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah korban bencana yang pulih kembali	Orang	20	20	20	20	20	20	100	100 orang

3.4.1 Uraian Pencapaian Tujuan

Tabel 25. Pengukuran Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023

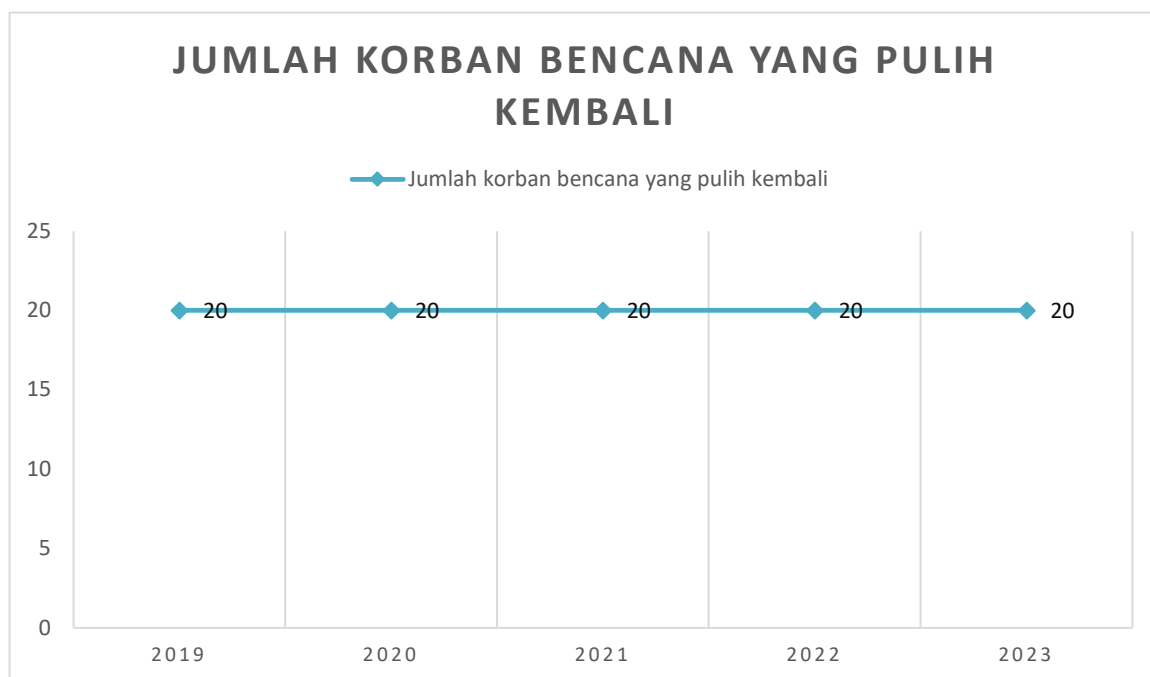
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah korban bencana yang pulih kembali	Orang	20	20	100

Kinerja Sasaran Meningkatnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana dicapai melalui indikator Jumlah Korban Bencana yang pulih kembali dengan target tahun 2023 sebesar 20 orang dan direalisasikan sebesar 20 orang, dan tercapai target. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan BPBD dalam penanggulangan bencana dilayani sampai pada tahapan pasca bencana.

Tabel 26. Analisis Pencapaian Target Akhir 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2023			Target Akhir Renstra (2023)
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah korban bencana yang pulih kembali	Orang	20	20	20	20	20	20	100	100 orang

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dari target 20 orang sudah dapat dicapai dengan realisasi 100%, sedangkan di tahun 2023 juga sudah dapat dicapai target sebanyak 20 orang. Jika dilihat dari tahun 2019-2021 juga indikator ini berhasil mencapai target dengan target per tahun sebanyak 20 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan BPBD dalam menanggulangan bencana dilayani sampai pasca bencana.



Gambar 10. Grafik jumlah korban bencana yang pulih kembali Tahun 2019-2023

Mengacu pada target akhir renstra periode 2019-2023, Jumlah korban bencana yang pulih kembali memiliki target akhir sebanyak 100 orang. Pada periode akhir Renstra tahun 2023 ini dapat direalisasikan sebanyak 100 orang dengan realisasi pencapaian sebesar 100%.

Pada periode Renstra tahun 2024-2026 indikator ini mengalami perubahan, jumlah korban bencana yang pulih kembali berubah menjadi presentase penanganan pasca bencana dengan komponen penyusun diantaranya adalah korban bencana yang pulih kembali dan koordinasi pasca bencana yang dilakukan. Diharapkan dengan perubahan indikator ini dapat meningkatkan pelayanan BPBD dalam hal pasca bencana di Kota Tangerang.

3.4.2 Upaya Yang Telah Dilakukan

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam mendukung pelaksanaan kinerja indikator tersebut diantaranya adalah:

1. Kegiatan rutin pasca bencana ke lapangan setelah kejadian bencana maupun kebakaran yang terjadi;
2. Koordinasi aktif dengan stakeholder kebencanaan yang ada di Kota Tangerang, diantaranya dengan Dinas PUPR, Dinas Sosial, Tagana, PMI, TNI, Polri dan stakeholder lainnya yang terlibat;

3. Koordinasi vertikal dengan BPBD Provinsi maupun BNPB dalam hal arahan serta kebijakan penanganan pasca bencana.

Pada tahun 2023, indikator ini didukung beberapa sub kegiatan dari program penanggulangan bencana dan program penunjang urusan pemerintahan daerah seperti tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 27. Program Pendukung Pelaksanaan Indikator

No	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi
1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	355.260.000	329.803.427
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen
2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	91.998.000	88.500.000
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	90 orang	90 orang
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	461.840.000	447.874.000
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket

3.4.3 Permasalahan Yang Dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi untuk mengurangi Jumlah Korban Bencana yang pulih kembali seperti:

1. Masih terbatasnya aparatur BPBD yang memiliki keterampilan psycosoisal, sehingga pemulihan korban belum berjalan maksimal;
2. Data korban bencana masih belum lengkap dan sulit didapatkan karena kapasitas aparatur belum merata serta belum mengertinya tentang data yang dibutuhkan;
3. Para pelaku penanggulangan bencana belum terkoordinir dengan baik sesuai aturan yang berlaku, atau tidak memahami tugas dari setiap stakeholder yang menangani bencana.

3.4.4 Solusi Terhadap Permasalahan

Berdasarkan dari permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka upaya yang akan dilakukan yaitu:

1. Melakukan bimtek psycososial bagi aparaturnya secara berkala dan merata agar tingkat kapastias dalam pelaksanaan pemulihan korban berjalan maksimal;
2. Perlu dilakukan standarisasi data serta peran aktif dan tanggung jawab bidang pengampu data tentang pentingnya data korban bencana;
3. Melakukan koordinasi secara periodik dengan para stakeholder dalam hal kebencanaan.

3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (mencakup realisasi capaian kinerja & realisasi capaian anggaran)

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya mencakup keseluruhan pencapaian sasaran strategis realisasi capaian kinerja dan realisasi capaian anggaran selama tahun 2023. Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil capaian kinerja (Tujuan dan Sasaran) yang dibandingkan dengan capaian anggaran yang digunakan atau direalisasikan. Analisis efisiensi ditunjukkan melalui tabel berikut.

Tabel 28. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

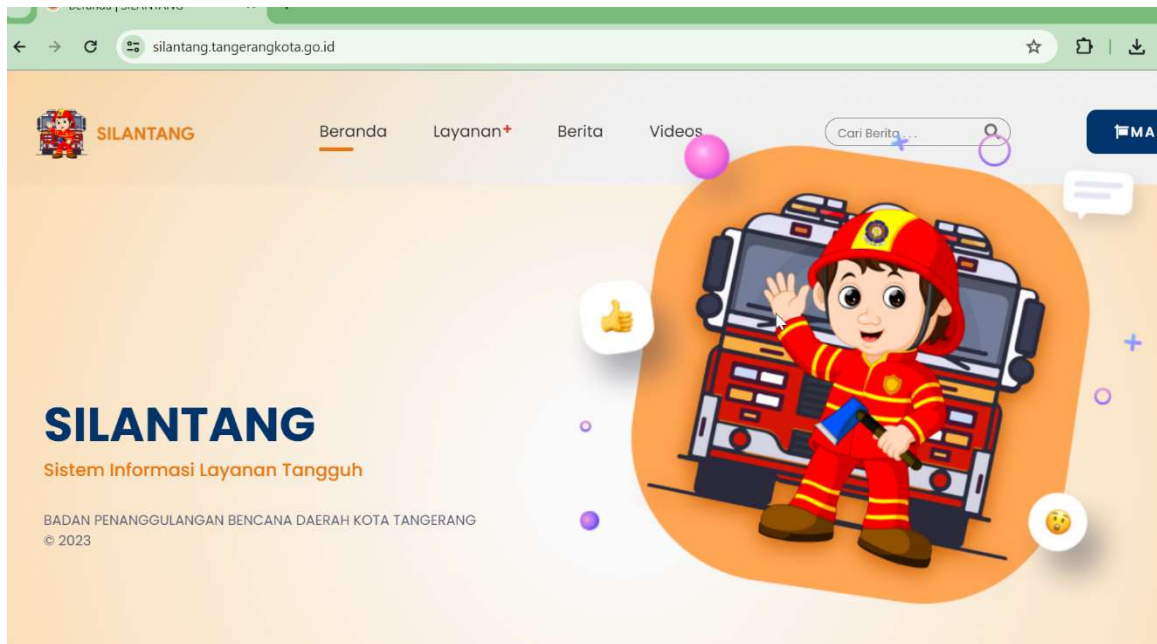
N o	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	Indikator	Program	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatkan Tata Kelola Kebencanaan	1	Indeks Risiko Bencana		90,79%	97,08%	- 6,29%
1.1	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1	Persentase kelurahan tangguh bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100,00%	91,46%	8,54%
1.2	Meningkatnya daya tanggap bencana	1	Tingkat waktu tanggap (Response rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK)	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	117,50%	99,29%	18,21 %

N o	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	Indikator	Program	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
1. 3	Meningkatnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1	Jumlah korban bencana yang pulih kembali	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00%	97,14%	2,86%
	Jumlah				102,07%	97,08%	5,00%

Dapat dilihat dari tabel di atas menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yaitu perbandingan antara capaian kinerja (102,07%) dan capaian anggaran (97,08%) memiliki efisiensi sebesar 5,00%. Angka positif pada nilai efisiensi menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh BPBD Kota Tangerang atas anggaran yang sudah ditetapkan. Namun bila dilihat dari capaian kinerja di level tujuan yaitu Indeks Risiko Bencana, masih berada di angkut 90,79%. Bila dibandingkan dengan keseluruhan capaian anggaran sebesar 97,08% belum terjadi efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator tersebut (nilai efisiensi -6,29%). Hal ini terjadi dikarenakan Indeks Risiko Bencana yang telah dibahas sebelumnya belum mencapai target sebesar 95,2 poin dan masih berada pada nilai 103,97 poin atau baru tercapai 90,79%.

Sedangkan jika dilihat dari indikator lainnya di tingkat sasaran didapatkan nilai efisiensi penggunaan sumber daya yang baik diantaranya adalah, Persentase kelurahan tangguh bencana dengan nilai efisiensi sebesar 8,54%, Tingkat waktu tanggap sebesar 18,21%, dan Jumlah korban bencana yang pulih kembali sebesar 2,86%. Analisis efisiensi sumber daya juga dilakukan BPBD dalam hal sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat. Sebagian besar sosialisasi maupun pelatihan bagi masyarakat sudah dilakukan oleh pegawai BPBD sendiri, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk narasumber eksternal.

Pada Tahun 2023 ini BPBD memiliki inovasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, yaitu dengan menggunakan inovasi Silantang (Sistem Informasi Layanan Tangguh). Melalui aplikasi SILANTANG ini, masyarakat dapat membuat permohonan layanan secara online. Beberapa layanan yang dapat dilakukan melalui SILANTANG diantaranya adalah permohonan sosialisasi dan pelatihan, permohonan pemeriksaan alat proteksi kebakaran, asistensi gambar bangunan, dan permohonan peminjaman sarana prasarana. Dengan adanya inovasi ini, data pengguna layanan dapat didokumentasikan secara baik dan dapat digunakan sebagai pemetaan daerah rawan maupun pengambilan keputusan berdasarkan historis layanan yang telah diberikan.



Gambar 11. Tampilan aplikasi SILANTANG BPBD

3.6 Akuntabilitas Keuangan

3.6.1 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama tahun anggaran 2023 sebesar Rp 38.626.100.082 atau 97,08% dari total pagu anggaran Rp 39.789.796.323 dengan rincian:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota sebesar Rp 34.976.581.713 atau 97,14% dari anggaran Rp 36.007.134.983;
2. Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp 1.241.199.927 atau 91,46% dari anggaran Rp 1.357.127.840;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp 2.408.318.442 atau 99,29% dari anggaran Rp 2.425.533.500.

Rincian realisasi anggaran tahun 2023 dari level program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29. Realisasi Keuangan dan Kinerja Tahun 2023 (Lampiran LKPJ)

Urusan Pemerintahan	OPD	Program/Kegiatan				Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	BPBD	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			36.007.134.983,00	34.976.581.713,00	95.97 %	
			Tingkat Ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran			100	100	100.00 %	
			Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah			100	100	100.00 %	
			Tingkat ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah			100	100	100.00 %	
			Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran			100	100	100.00 %	
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai			100	100	100.00 %	
			Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah			100	100	100.00 %	
			Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah			100	100	100.00 %	
			Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah			100	100	100.00 %	
			1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.271.791.373,00	13.706.019.894,00	96.06 %

Urusan Pemerintahan	OPD	Program/Kegiatan			Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
				Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi keuangan	(100) 1 Jenis	1 Jenis	100.00 %
		1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.271.791.373,00	13.706.019.894,00	96.06 %
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	(100) 56 Orang	56 orang	100.00 %
		2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.221.293.600,00	2.129.745.824,00	95.88 %
				Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi umum	(100) 7 Jenis	7 Jenis	100.00 %
		1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.065.900,00	15.384.378,00	95.76 %
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	(100) 1 Paket	1 paket	100.00 %
		2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	753.217.800,00	707.372.983,00	93.91 %
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	(100) 1 Paket	1 paket	100.00 %
		3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.541.800,00	32.206.380,00	96.02 %
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	(100) 1 Paket	1 paket	100.00 %
		4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	461.840.000,00	447.874.000,00	96.98 %
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	(100) 1 Paket	1 paket	100.00 %
		5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	103.425.100,00	89.957.804,00	86.98 %
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	(100) 1 Paket	1 paket	100.00 %
		6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	71.970.000,00	68.910.000,00	95.75 %
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	(100) 4 Dokumen	4 dokumen	100.00 %
		7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	781.233.000,00	768.040.279,00	98.31 %
				Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	(100) 12 Laporan	12 laporan	100.00 %
		3		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.511.735.510,00	18.238.724.337,00	98.53 %
				Jumlah pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	(100) 2 Jenis	2 jenis	100.00 %

Urusan Pemerintahan	OPD	Program/Kegiatan			Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	377.350.000,00	335.864.965,00	89.01 %
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	(100) 12 Laporan	12 laporan	100.00 %
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.134.385.510,00	17.902.859.372,00	98.72 %
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	(100) 12 Laporan	12 laporan	100.00 %
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.002.314.500,00	902.091.658,00	47.92 %
				Jumlah pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	(100) 4 Jenis	4 jenis	100.00 %
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	457.000.000,00	408.334.364,00	89.35 %
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	(100) 41 Unit	41 unit	100.00 %
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.650.000,00	35.895.900,00	46.83 %
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(100) 41 Unit	41 unit	100.00 %
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.679.500,00	36.043.000,00	84.45 %
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	(100) 8 Unit	8 unit	100.00 %
			4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	425.985.000,00	421.818.394,00	0.00 %
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	(100) 1 Unit	1 unit	100.00 %
	BPBD	2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		1.357.127.840,00	1.241.199.927,00	91.46 %
				Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100.00 %
				Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100.00 %
			1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	97.735.800,00	79.890.000,00	81.74 %
				Jumlah pelayanan data/informasi tentang jenis dan risiko bencana	(100) 1 Jenis	1 jenis	100.00 %
			1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	97.735.800,00	79.890.000,00	81.74 %

Urusan Pemerintahan	OPD	Program/Kegiatan				Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	(100) 300 Orang	300 orang	100.00 %
			2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1.167.394.040,00	1.072.809.927,00	91.90 %
				Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan		(100) 6 Jenis	6 jenis	100.00 %
			1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		252.176.900,00	218.276.000,00	86.56 %
				Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi		(100) 1 Dokumen	1 dokumen	100.00 %
			2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		331.131.540,00	310.109.500,00	93.65 %
				Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		(100) 300 Orang	300 orang	100.00 %
			3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		355.260.000,00	329.803.427,00	92.83 %
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		(100) 12 Dokumen	12 dokumen	100.00 %
			4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		74.641.000,00	72.000.000,00	96.46 %
				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas		(100) 1 Unit	1 unit	100.00 %
			5	Penyusunan Rencana Kontijensi		154.184.600,00	142.621.000,00	92.50 %
				Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		(100) 1 Dokumen	1 dokumen	100.00 %
			3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		91.998.000,00	88.500.000,00	96.20 %
				Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		(100) 1 Jenis	1 jenis	100.00 %
			1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		91.998.000,00	88.500.000,00	96.20 %
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		(100) 90 Orang	90 orang	100.00 %
	BPBD	3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			2.425.533.500,00	2.408.318.442,00	99.29 %
			Rata-rata waktu tanggap penanganan bencana kebakaran di daerah layanan WMK			15,00	12,37	117.53 %

Urusan Pemerintahan	OPD	Program/Kegiatan			Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
			Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran		100	100	100.00 %
			Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana non kebakaran (banjir)		100	100	100.00 %
			Tingkat ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana		100	100	100.00 %
		1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.425.533.500,00	2.408.318.442,00	99.29 %
			Jumlah pelayanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran		(100) 2 Jenis	2 jenis	100.00 %
		1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		816.090.000,00	814.994.770,00	99.87 %
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		(100) 1 Dokumen	1 dokumen	100.00 %
		2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		645.130.000,00	644.125.472,00	99.84 %
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		(100) 12 Laporan	12 laporan	100.00 %
		3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		964.313.500,00	949.198.200,00	98.43 %
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		(100) 5 Unit	5 unit	100.00 %
					39.789.796.323,00	38.626.100.082,00	97,08

Dari tabel diatas dapat terlihat pada terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya dibawah 90%. Adapun penjelasan untuk kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- a) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (86,98%) yang terdiri dari belanja barang cetak dan fotokopi yang direalisasikan sesuai dengan kebutuhan (real cost);
- b) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (89,01%) yang terdiri dari belanja rutin pembayaran Listrik, air, internet, telepon yang direalisasikan sesuai dengan penggunaan (real cost);
- c) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (89,35%) yang direalisasikan sesuai dengan penggunaan (BBM dan service kendaraan dinas jabatan sesuai real cost);
- d) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (46,83%) yang terdiri dari pembayaran pajak kendaraan dinas dikarenakan banyaknya kendaraan yang tidak dibayarkan pajaknya;
- e) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (84,45%) yang direalisasikan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor (real cost).

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

- a) Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) (81,74%) yang terdiri dari honor narasumber kelurahan tangguh bencana yang direalisasikan sesuai dengan narasumber yang hadir;
- b) Sub kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (86,56%) yang direalisasikan sesuai dengan kontrak (kegiatan dilakukan melalui konsultan penyusunan dokumen RPB).

Penyerapan anggaran oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama tahun anggaran 2023 sebesar Rp 38.626.100.082 atau 97,08% dari total pagu anggaran. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa sub kegiatan yang memiliki realisasi dibawah 90%. Beberapa sub kegiatan tersebut Sebagian besar merupakan realisasi real cost sesuai kebutuhan, akan diupayakan untuk tahun selanjutnya pada saat anggaran perubahan dapat dilakukan analisis lebih awal agar anggaran real cost yang diprediksi tidak dapat diserap dapat dialihkan ke belanja lainnya yang dapat direalisasikan.

3.6.2 Realisasi Pendapatan (Retribusi APAR)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Target dan realisasi retribusi dari tahun 2009 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30. Realisasi Retribusi APAR Tahun 2009-2023

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	2009	110.000.000	110.793.773	100,72 %
2.	2010	120.598.227	120.606.241	100,06 %
3.	2011	149.333.916	149.334.153	100,00 %
4.	2012	250.000.000	252.213.545	100,89%
5.	2013	500.000.000	445.944.872	89,19%
6.	2014	500.000.000	299.270.045	59,85%
7.	2015	500.000.000	305.674.512	61,13%
8.	2016	500.000.000	307.556.340	61,13%
9.	2017	500.000.000	314.477.549	62,90%
10.	2018	600.000.000	288.394.822	48,07%
11.	2019	685.055.000	521.346.109	76,10%
12.	2020	376.780.250	412.977.363	109,61%
13.	2021	640.526.425	542.927.543	84,76%
14	2022	850.000.000	756.582.043	89,01%
15	2023	950.000.000	889.691.525	93,65%

Rincian pendapatan retribusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang tahun 2023 tiap bulan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 31. Capaian Retribusi APAR Tahun 2023

No	Bulan	Pendapatan (Rp)	Jumlah Pendapatan (Rp)	Presentase
1	Januari	25.616.900	25.616.900	2,70%
2	Februari	44.285.315	69.902.215	7,36%

No	Bulan	Pendapatan (Rp)	Jumlah Pendapatan (Rp)	Presentase
3	Maret	57.741.550	127.643.765	13,44%
4	April	34.356.530	162.000.295	17,05%
5	Mei	25.429.475	187.429.770	19,73%
6	Juni	117.159.785	304.589.555	32,06%
7	Juli	86.996.225	391.585.780	41,22%
8	Agustus	141.717.510	533.303.290	56,14%
9	September	118.721.210	652.024.500	68,63%
10	Oktober	69.817.625	721.842.125	75,98%
11	November	80.309.450	802.151.575	84,44%
12	Desember	87.539.950	889.691.525	93,65%
TOTAL		889.691.525		
	Target	950.000.000		

Realisasi pendapatan retribusi APAR tahun 2023 adalah sebesar Rp 889.691.525 dengan presentase 93,65% dari target tahun 2023 sebesar Rp 950.000.000 Terdapat selisih pendapatan yaitu sebesar Rp 60.308.475 dari total target pendapatan retribusi APAR tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

Bab Penutup ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Saran yang memuat strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

4.1 Simpulan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban instansi pemerintah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memasukkan target Sasaran Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran di dalam RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019-2023; Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023.

Dari empat target kinerja yang dilaksanakan BPBD pada tahun 2023, terdapat satu indikator yang belum memenuhi target yaitu Indeks Risiko Bencana dengan target sebesar 95,2 poin baru tercapai 103,97 poin. Sedangkan tiga indikator lainnya dapat dicapai dengan baik yaitu presentase kelurahan tangguh bencana tercapai 100% (target 10 kelurahan), Tingkat waktu tanggap (respon time) tercapai 117,5% (12,47 menit dari target 15 menit), dan jumlah korban bencana yang pulih kembali 100% (target 20 orang). Adapun upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lain yang telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama tahun 2023, sebagai berikut:

1. Upaya yang akan dilakukan untuk menjadikan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana yaitu membentuk Kelurahan Tangguh Bencana, sebanyak 10 kelurahan dibentuk di Tahun 2023 dengan mencakup kegiatan pelatihan dan sosialisasi untuk bencana kebakaran dan banjir, serta secara aktif melalui berbagai media memberikan informasi mengenai kebencanaan;

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, berupa pengadaan alat-alat pemadam kebakaran;
3. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Tahun 2023 dilakukan operasi pemadaman kebakaran sebanyak 310 kali di Kota Tangerang;
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, berupa pemeliharaan dan bahan bakar untuk unit dan peralatan operasional.

4.2. Saran

Sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2023 dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah untuk dapat diterapkan pada periode yang akan datang, yaitu:

1. Melakukan Kegiatan Kesiapsiagaan Bencana yang meliputi pembentukan kampung tangguh bencana, simulasi tanggap bencana dan penyebaran informasi kebencanaan.
2. Kegiatan pencegahan bencana yang meliputi penyuluhan pencegahan bencana berlokasi di kawasan padat penduduk dan pembentukan sekolah aman bencana.
3. Menentukan standar keterampilan dan keahlian personal di lapangan sehingga pelaksanaan penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
4. Melakukan kegiatan Rehabilitasi bencana meliputi koordinasi pasca bencana, pendataan, inspeksi dan investigasi pasca bencana.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. KS. Tubun No. 96A, Tangerang Telp. (021) 5582144 Fax. (021) 55769069

Website : bpbdt.tangerangkota.go.id, Email : bpbdt@tangerangkota.go.id

TANGERANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No: 050/ 336 -BPBD

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Maryono, AP, M.Si

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Arief R. Wismansyah

Jabatan : Walikota Tangerang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 9 Januari 2021

Pihak Kedua,

WALIKOTA TANGERANG

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Pihak Pertama,

KEPALA PELAKSANA BPBD

H. MARYONO, AP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750210 199311 1 001



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. KS. Tubun No. 96A, Tangerang Telp. (021) 5582144 Fax. (021) 55769069

Website : bpbdt.tangerangkota.go.id, Email : bpbdt@tangerangkota.go.id

TANGERANG

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

MISI 1: Bersama mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Tata Kelola Kebencanaan	Indeks Risiko Bencana	Indeks	95,2
2	Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Permitasi Kekerasan Tenggah Bencana	%	9,61
3	Meningkatnya Daya Tanggap Bencana	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Ratio) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Menit	15
4	Meningkatnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasa Bencana	Jumlah Korban Bencana yang pulih kembali	Orang	20

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	PROGRAM PUNUKANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.506.126.122,00
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.423.556.500,00
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.081.017.500,00
	<i>Jumlah</i>	36.010.700.122,00

Tangerang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

WALIKOTA TANGERANG

KEPALA PELAKSANA BPBD

H. ARIEF R. WISMANSYAH

H. MARYONO, S.P., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750210 19931 1 1 001

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LKE SAKIP BPBD TAHUN 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		27,6		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,4		
Kriteria:					Seluruh kriteria pada sub komponen dokumen perencanaan kinerja telah tersedia kecuali pedoman teknis perencanaan kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1eMnv4VJDW_GpzYh_UWi6oL2i0tzHS_Xs9?usp=share_link
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.		-	0		
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.			100		
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.			100		
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.			100		
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.			100		
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.			100		
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,2		
Kriteria:					Terdapat kriteria sub komponen yang belum terpenuhi sesuai yang tersaji pada LKIP maupun dokumen pendukung terkait yaitu Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) .	https://drive.google.com/drive/folders/1ek9Eh044NgWwxd1DptYddD5imyDUoi7I?usp=share_link
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.		-	60,00		
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.		-	80,00		
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.		-	100,00		
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		-	100,00		
6	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.		-	100,00		
5	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		-	90		
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.		-	99,90		
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).		-	70,00		

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).		-	25,00		
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		-	100,00		
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		-	100,00		
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	AA	15		
Kriteria:						https://drive.google.com/drive/folders/1ek9Eh044NgWwxd1DptYddD5imyDUoJ7I?usp=share_link
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.		-	100,00		
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.		-	95,00		
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .		-	98,71		
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.		-	80,00		
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.		-	90,00		
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.		-	90,00		
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		-	100,00		
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		-	—		
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		21,9		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	B	4,2		
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.		-	0	Terdapat kriteria sub komponen yang belum terpenuhi sesuai yang tersaji pada LKIP maupun dokumen pendukung terkait yaitu pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja belum ditetapkan.	https://drive.google.com/drive/folders/1fMc9L9-JZoaQYPw1ZWfXV8UoLMSBJ32N?usp=share_link
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.			100,00		
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.			100,00		
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	BB	7,2		
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.		-	75,00		https://drive.google.com/drive/folders/1fMc9L9-

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.		-	100,00		JZoaQYPw1ZWfXV8UoLMSBJ32N?usp=share_link
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.			100,00		
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.			80,00		
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.		-	80,00		
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		-	70,00		
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		-	70,00		
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	B	10,5		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.			75,00	terdapat kriteria sub komponen yang belum terpenuhi sesuai yang tersaji pada LKIP maupun dokumen pendukung terkait, yaitu pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, serta belum mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.	https://drive.google.com/drive/folders/1fMc9L9-JZoaQYPw1ZWfXV8UoLMSBJ32N?usp=share_link
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.			55,00		
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.			55,00		
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.			65,00		
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.			65,00		
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.			65,00		
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.			65,00		
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.			65,00		
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			65,00		
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			55,00		
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		12,15		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	B	2,1		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.		-	75,00		https://drive.google.com/drive/folders/1g5ZC-kXOfxihLKK1c9WY4Fc-uSiF-RHH?usp=share_link
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.			75,00		
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.			75,00		
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.			50,00		

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.			75,00		
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.			50,00		
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	A	4,05		
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.		-	83,33		https://drive.google.com/drive/folders/1g5ZC-kXOfxihLKk1c9WY4Fc-uSiF-RHH?usp=share_link
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.			100,00		
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.			100,00		
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.			100,00		
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.			100,00		
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).		-	60,00		
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.			100,00		
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.			80,00		
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).			60,00		
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6		
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).			80,00		https://drive.google.com/drive/folders/1g5ZC-kXOfxihLKk1c9WY4Fc-uSiF-RHH?usp=share_link
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.			60,00		
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.		-	80,00		
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.			80,00		
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.			80,00		

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.			60,00		
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.			60,00		
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		19		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	A	4,5		
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.			60,00		https://drive.google.com/drive/folders/1qJFDVQUsleiEyHwcJK4GSc-przi5P3e?usp=share_link
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		-	100,00		
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.			100,00		
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	CC	4,5		
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.			60,00		https://drive.google.com/drive/folders/1qJFDVQUsleiEyHwcJK4GSc-przi5P3e?usp=share_link
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.			60,00		
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.		-	60,00		
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.			60,00		
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).			60,00		
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10		
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.		-	85,00		https://drive.google.com/drive/folders/1qJFDVQUsleiEyHwcJK4GSc-przi5P3e?usp=share_link
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.			65,00		
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.		-	85,00		
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.			70,00		
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		-	85,00		
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		-	80,65		
	Predikat SAKIP		-	A	MEMUASKAN	

<u>No</u>	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		